

**Judul** : BAKN Simpulkan Andi Terlibat  
**Tanggal** : Jumat, 16 Nopember 2012  
**Surat Kabar** : Republika  
**Halaman** : 3

## BAKN Simpulkan Andi Terlibat

■ Mansyur Faqih

**BAKN merekomendasikan DPR mengajukan hak interpelasi proyek Hambalang.**

JAKARTA — Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR menyelesaikan telaah terhadap laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal proyek kompleks pendidikan olahraga Hambalang. Salah satu kesimpulannya, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng terlibat dalam penyimpangan di proyek ini.

Dalam laporan telaah BAKN, selepas vakum sejak 2004, proyek Hambalang dimulai kembali setelah Sesmenpora Wafid Muharam dan Tim Asistensi mempresentasikan rencana proyek kepada Menpora Andi Mallarangeng. Penjabaran itu dilakukan di rumah kediaman Andi di Cilangkap, Jakarta Timur.

Saat itu, Andi kemudian mengusulkan proyek Hambalang diubah dari pusat peningkatan prestasi olahraga nasional (PPPON) menjadi pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional (P3SON). Andi juga mengusulkan penambahan fasilitas di kompleks Hambalang, seperti asrama atlet senior, *amphitheatre*, dan arena olahraga ekstrem.

Hasil telaah BAKN menyimpulkan, ada penyimpangan dan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan indikasi kerugian negara setidaknya sebesar Rp 243 miliar. "Kami telah menegaskan bahwa memang Menpora Andi Mallarangeng terlibat dalam meminta tambahan anggaran Hambalang, tidak diduga lagi, tetapi memang terlibat," ujar Ketua BAKN Sumarjati Arjosjo di gedung parlemen Jakarta, Rabu (14/11).

BAKN juga menilai Andi bertanggung jawab dalam pelanggaran pengajuan pendanaan tahun jamak proyek Hambalang. Menurut Sumarjati, meskipun surat pengajuan tahun jamak yang diajukan pada menteri keuangan ditandatangani oleh Sesmenpora Wafid Muharam, Andi sebagai menpora mestinya mengetahui hal itu.

Karena itu, tugas dia, wewenang dia, dan melekat pada dia," kata Sumarjati. Berbeda dengan hasil telaah BAKN, dalam hasil audit BPK Andi hanya disebut melakukan pembiaran atas penyimpangan.

### Rekomendasi

Anggota BAKN dari fraksi PDI Perjuangan, Eva K Sundari, menyatakan, atas

hasil telaah, BAKN mengeluarkan beberapa rekomendasi. Pertama, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi Proyek Hambalang yang menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 243,66 miliar. Serta, mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana terkait Proyek Hambalang.

Menurut Eva, BAKN juga menyesalkan diuskinya independensi BPK dan kebocoran laporan BPK. BAKN meminta lembaga auditor tersebut segera melakukan audit lanjutan.

Komisi X dan Pokja Anggaran di DPR juga dinilai bertanggung jawab atas proses pembahasan dan per-

setujuan anggaran proyek P3SON Hambalang Bogor. Proyek Hambalang tahap awal pada 2010 membutuhkan dana Rp 275 miliar, namun kemudian menjadi Rp 1,175 triliun pada 2012. "BAKN juga meminta DPR untuk mempergunakan hak bertanya (interpelasi) kepada pemerintah sehubungan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek P3SON," ujar Eva.

Wasekjen Partai Demokrat (PD), Saan Mustopa, menyatakan, menyerahkan urusan keterlibatan Andi Mallarangeng yang juga kader partai Demokrat kepada KPK.

"Kita serahkan dulu kepada KPK untuk mendalami apa yang menjadi pembahasan BAKN," ujarnya. Menurut dia, BAKN bukan institusi hukum yang bisa memutus seseorang bersalah atau tidak.

Wakil Ketua DPR Anis Matta menilai DPR bisa saja mengajukan hak interpelasi untuk mengungkap penyimpangan Proyek Hambalang, Bogor. Menurut dia, hal ini akan dirapatkan lebih lanjut oleh pimpinan DPR. "Pengajuan usulan hak interpelasi itu ada mekanisme dan prosedurnya. Mungkin temuan BAKN DPR bisa menjadi rujukan," kata Anis Matta.

Dugaan korupsi Proyek Hambalang bermula dari kicauan mantan bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin. Menurut Nazaruddin, Andi dan Ketua Umum Demokrat Anas-Urbaningrum menerima aliran dana korupsi Proyek Hambalang.

KPK telah menetapkan mantan kepala Biro Perencanaan Kemenpora Dedy Kusnidar sebagai tersangka kasus ini. Andi dan Anas berulang-ulang membantah terlibat korupsi Proyek Hambalang. Kendati demikian, selepas keluarnya laporan audit BPK, Andi menyatakan siap bertanggung jawab.

### PENYIMPANGAN HAMBALANG

BAKN menyimpulkan menemukan berbagai penyimpangan proyek Kompleks Sekolah Olahraga Hambalang. Berikut ringkasan hasil telaah BAKN atas laporan audit BPK terkait Proyek Hambalang.

- Perizinan lokasi dan pendirian bangunan untuk Proyek Hambalang disetujui Bupati Bogor (RY) dan jajaran di bawahnya meskipun Kemenpora selaku pemohon belum melakukan studi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
- Menteri Pemuda dan Olahraga (AAM), Sekretaris Kemenpora (WM) dan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora (DK) melakukan pelanggaran dalam menyampaikan permohonan kontrak tahun jamak kepada menteri keuangan.
- Menteri Keuangan (AMW) dan jajaran di bawahnya melakukan pelanggaran dalam menetapkan persetujuan kontrak tahun jamak.
- Para pejabat Kemenpora melakukan pelanggaran dalam pemilihan rekanan proyek Hambalang.
- Kabag Keuangan Kemenpora (RI), Kepala DK-I PT AK (TBMN), dan Dirut PT DC (MS), secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran dalam pencairan uang muka proyek Hambalang.

Sumber: Hasil Telaah BAKN atas Audit Tahap I BPK Terkait Proyek Hambalang.